BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya sebagai landasan terkait dengan Analisis Program *Corporate social responsibility* Dalam *Sustainability Report* Berdasarkan GRI 400 *Standards* Pada Perusahaan PT Sat Nusapersada Tbk, sebagai berikut :

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1.	Analisis Kepatuhan Sustainbility Reporting PT. Aneka Tambang, Tbk. Berdasarkan GRI Standards, AA1000AP dan AA1000AS, Prayogo Gunawan, Carmel Meiden, 2021	Berdasarkan GRI Standards ,AA1000 AP dan AA1000 AS.	Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kelangsungan hidup generasi sekarang tanpa membahayakan kelangsungan hidup generasi mendatang, dengan memperhatikan segala aspek. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Perusahaan mengikuti standar yang berlaku dalam pelaporan pertanggungjawaban,	Perbedaan : Membahas perusahaan tambang untuk standar GRI. Persamaan : Sama – sama membahas tentang Analisis Kepatuhan Sustainbility Reporting pada Perusahaan dan sesuai dengan teori yang di pelajari.

			yaitu. Standar GRI, AA1000AP dan AA1000AS. Dengan menggunakan metode purposive sampling, sampel penelitian diambil pada perusahaan pertambangan PT. Aneka Tambang, Tbk. terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum PT. Aneka Tambang, Tbk. menyelesaikan pemberitahuan sesuai dengan standar ini.	

2.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY), Erni R. Ernawan,2021	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	Tanggung jawab sosial perusahaan tidak lepas dari peran serta pengusaha, negara, dan masyarakat. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya sebatas mendukung lingkungan sosial secara finansial, namun juga bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya tanpa diskriminasi, menjaga hubungan baik dengan pemasok, dan program yang dilaksanakan bersifat jangka panjang.	Perbedaan : Tidak menjelaskan dengan terperinci terkaid pengamplikasian GRI Standart Secara kompleks. Persamaan : penerapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai budaya perusahaan, tertanam sebagai nilai internal (keunggulan kompetitif diciptakan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan dalam strategi), yang juga tidak kalah pentingnya dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas dan pelaporan kepada perusahaan . publik (sejauh ini hanya laporan keuangan yang disajikan)..

3	ANALISIS PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP GOOD CORPORATE OVERNANCE PADA CV.PETRA KAUSA MEDAN	GOOD CORPORATE OVERNANCE	pada prinsip Transparansi,perusahaan telah memberikan informasi kepada pihak internal dan eksternal. Penyampaian kebijakan kepada perusahaan dilakukan secara lisan dan tertulis. Pada prinsip Akuntabilitas, perusahaan memiliki Sistem pengendalian internal, indikator kinerja utama, dan tujuan perusahaan. Sesuai dengan prinsip tanggung jawab, dunia usaha harus menghormati norma-norma sosial dengan tidak merusak lingkungan dan mematuhi peraturan pemerintah. Sesuai prinsip independensi, kami tidak bergantung pada campur tangan pihak lain.Agar adil, semua departemen di perusahaan diperlakukan sama.	Perbedaan : Tidak menjelaskan dengan terperinci terkaid pengamplikasian GRI Standart Secara kompleks Persamaan : Prinsip-prinsip operasi perusahaan dikomunikasikan secara lisan dan tertulis. Penerapan prinsip tanggung jawab pada perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai sistem pengendalian internal yang terdiri dari: struktur organisasi perusahaan dan rincian tugas dan tanggung jawabnya..

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Stakeholder

Pengungkapan keuangan, sosial, dan lingkungan merupakan dialog antara perusahaan dan pemangku kepentingannya yang memberikan informasi tentang aktivitas perusahaan yang dapat mengubah persepsi dan harapan (Adam dan McNicholas, 2007). Keterbukaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan dan mendapatkan dukungan mereka untuk kelangsungan keberadaan perusahaan. Semakin baik suatu perusahaan dalam mengungkapkan CSR, maka pemangku kepentingan akan semakin mendukung penuh perusahaan dalam segala aktivitasnya guna meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai manfaat yang diharapkan.

Konsep CSR telah digunakan sejak tahun 1970-an dan biasa disebut dengan teori pemangku kepentingan. Istilah pemangku kepentingan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 (Freeman, 1984, setelah Freeman), Stakeholder diartikan sebagai organisasi, kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Freeman (2010:32) kemudian menambahkan:.

Pemangku kepentingan dalam lingkungan organisasi. Pemerintah menghargai pemangku kepentingan eksternal. Karena pemangku kepentingan eksternal. Pengertian pemangku kepentingan dapat dijelaskan berdasarkan klasifikasinya. Menurut Kasali (2005), pemangku kepentingan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Dengan kata lain: Pemangku kepentingan internal mengacu pada orang-orang yang paling penting dalam lingkungan organisasi, seperti karyawan, manajer, dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan masyarakat

umum dan kelompok marginal masing-masing disebut pemasok, konsumen, dan pelanggan.

Pemangku kepentingan primer merupakan pemangku kepentingan yang perlu mendapat perhatian perusahaan, pemangku kepentingan sekunder merupakan pemangku kepentingan pihak yang kurang penting, sedangkan pemangku kepentingan marjinal merupakan pemangku kepentingan yang sering diabaikan oleh perusahaan (Hadi, 2011: 110).

Menurut Kasali (2005), karyawan dan konsumen adalah pemangku kepentingan tradisional yang saat ini terlibat dalam organisasi, sedangkan pemangku kepentingan di masa depan adalah pemangku kepentingan. pemangku kepentingan masa depan, termasuk mahasiswa, peneliti, dan potensi yang diharapkan mempengaruhi organisasi, termasuk konsumen.Stakeholder pendukung adalah pemangku kepentingan yang berada di pihak perusahaan, pemangku kepentingan lawan adalah pemangku kepentingan yang tidak berada di pihak perusahaan, dan pemangku kepentingan yang sudah tidak berkepentingan dengan perusahaan disebut pemangku kepentingan yang tidak terlibat (disengaged pemangku kepentingan). Aktor mayoritas yang diam dan aktor minoritas yang keras dapat dibedakan dari aktivitas para pemangku kepentingan dalam mengadukan dan mendukung perusahaan. Tentu saja, sebagian orang secara aktif (secara vokal) mengungkapkan penolakan atau dukungannya, sementara sebagian lainnya secara pasif (diam-diam) (Hadi, 2011).

Selain itu, Certo dan Certo (2006) dalam Lesmana dan Tarigan (2014:108)

mengklasifikasikan pemangku kepentingan perusahaan dan standar kepuasan yang ingin dipenuhi perusahaan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Para Pemangku Kepentingan Perusahaan.

Stakeholder	Kriteria Kepuasan Stakeholder
Pemerintah	Perpajakan, PPN, Undang-undang, Pekerjaan, Pelaporan.
Pelanggan	Nilai Pelanggan, Kualitas, Layanan pelanggan, Produk etis
Supplier	Penyedia produk dan jasa yang digunakan dalam produk akhir
Kreditor	Skor kredit, kontrak baru, likuiditas
Masyarakat	Pekerjaan, keterlibatan, Perlindungan lingkungan, Sahan
Serikat Pekerja	Kualitas, Perlindungan pekerja, pekerjaan
Pemilik	Profitabilitas, Umur panjang, Pangsa pasar, Berdiri Pasar
Investor	Pengembalian investasi, Pendapatan

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa perusahaan bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri, dan bukan merupakan organisasi yang mengejar keuntungan secara eksklusif, melainkan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingannya (dalam hal ini pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan organisasi harus melakukan hal tersebut). analis dan pihak berkepentingan lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kelangsungan hidup dan keberlanjutan suatu perusahaan sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh pemangku kepentingan kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Perkembangan teori pemangku kepentingan diawali dengan adanya perubahan pendekatan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Menurut Budimanta et al., (2008), ada dua bentuk pendekatan pemangku kepentingan, yaitu hubungan dengan perusahaan lama dan hubungan dengan perusahaan baru. Perbedaan mendasar kedua pendekatan tersebut terlihat pada fokusnya pada pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Hubungan korporasi lama menekankan pada bentuk aktivitas korporasi yang terpisah, dengan masing-masing fungsi dalam perusahaan menjalankan tugasnya masing-masing tanpa keseragaman.Hubungan dengan perusahaan luar bersifat jangka pendek; Tidak ada kerja sama yang saling menguntungkan dan hanya sebatas hubungan bisnis. Pendekatan ini menimbulkan banyak konflik bagi bisnis baru karena secara tidak langsung menjauhkan perusahaan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pendekatan relasional berfokus pada kolaborasi antara perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya. Sedangkan hubungan kami dengan pemangku kepentingan internal didasarkan pada konsep saling menguntungkan. Hubungan kami dengan pemangku kepentingan eksternal didasarkan pada konsep saling menguntungkan, bersifat fungsional dan berbasis kemitraan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendekatan hubungan korporat yang baru menghilangkan jarak antar pemangku kepentingan perusahaan.

Dengan model hubungan seperti itu, arah dan tujuan perusahaan tidak lagi sekedar mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, namun tentang pembangunan berkelanjutan. Artinya, perusahaan tidak lagi terisolasi dari pemangku kepentingannya.

Demikian kesimpulan dari teori pemangku kepentingan. Teorinya, keberlanjutan perusahaan tidak lepas dari peran pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan latar belakang dan kepentingan berbeda. CSR dapat menjadi strategi perusahaan untuk merespon ketertarikan pemangku kepentingan terhadap informasi perusahaan non-keuangan mengenai dampak sosial dan

lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan. Peningkatan pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan akan memastikan bahwa pemangku kepentingan mendukung penuh seluruh aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mencapai manfaat yang diharapkan.

2.2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi adalah teori lain di balik CSR yang berkaitan erat dengan teori pemangku kepentingan.

Perubahan nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial yang menyertai perkembangan peradaban manusia merupakan contoh yang melatarbelakangi perubahan legitimasi (Lindblom, 1994: 13-16).

Menurut Deegan, et.al (2002: 319-320), dari perspektif teori legitimasi, jika manajemen yakin bahwa ini adalah apa yang diharapkan masyarakat, maka perusahaan akan melaporkan aktivitas kami sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, kami akan terus melakukan upaya untuk memastikan bahwa perusahaan kami beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat atau lingkungan di mana mereka beroperasi (Deegan, 2004). Lebih lanjut, legitimasi organisasi dapat dipandang sebagai representasi dari apa yang masyarakat berikan kepada perusahaan, apa yang diinginkan atau diharapkan perusahaan dari masyarakat, dan manfaat atau sumber daya potensial bagi kelangsungan hidup perusahaan).

Kesenjangan antara nilai-nilai perusahaan dan masyarakat sering kali digambarkan sebagai “kesenjangan legitimasi” yang menghambat kemampuan perusahaan dalam melanjutkan bisnisnya (Lesmana dan Tarigan, 2014: 108).

Ketika kegiatan usaha suatu perusahaan (corporate events) sesuai dengan harapan masyarakat maka terjadilah konformitas, yang meliputi kesesuaian dengan nilai dan norma masyarakat, begitu pula sebaliknya.Dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya kesenjangan legitimasi.

Pertama, laba perusahaan berubah, namun ekspektasi masyarakat terhadap perubahan kinerja perusahaan tetap sama. Perusahaan yang dulunya bertanggung jawab secara sosial seringkali berhenti melaksanakan programnya karena berbagai alasan. Soal legitimasi muncul sehubungan dengan perubahan operasional perusahaan, namun di sisi lain masyarakat sudah ketagihan dengan program rutin tersebut dan tidak mau berhenti.

Kedua, hasil perusahaan tidak berubah, namun ekspektasi masyarakat terhadap aktivitas perusahaan berubah. Di sisi lain, perusahaan menilai penciptaan lapangan kerja di masyarakat lokal tidak berdampak positif bagi perusahaan, karena pelatihan yang diberikan terbatas dan belum dilaksanakan.

Ketiga, kinerja organisasi dan ekspektasi masyarakat berubah ke arah yang berbeda atau ke arah yang sama pada waktu yang berbeda. Perusahaan menggunakan pekerja lokal sebagai tenaga kerja murah bagi perusahaan, sehingga mengurangi pengangguran di daerah tersebut pada saat itu. dari.

Namun setelah itu, perusahaan melakukan PHK dan warga sekitar yang bekerja di perusahaan tersebut menderita. Perusahaan mengganti pekerja manusia dengan mesin karena mereka percaya bahwa mesin dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perusahaan bahkan dapat mengurangi kerugian perusahaan. Masyarakat setempat menerima keputusan ini dan berharap penghidupan mereka

dapat ditopang oleh gaji yang ditawarkan perusahaan dengan dukungan finansial dari usaha kecil dan menengah setempat.

Masalah keterbacaan muncul ketika perusahaan gagal memenuhi harapan. Selanjutnya berdasarkan pernyataan O'Donovan (2002) sebelumnya dalam Grahovar (2011),. kesenjangan legitimasi meningkatkan kesesuaian antara operasi perusahaan dan harapan masyarakat, termasuk peningkatan tanggung jawab sosial termasuk keterbukaan informasi.Adanya kesenjangan legitimasi akibat ketidaksesuaian antara kegiatan operasional perusahaan dengan harapan masyarakat menimbulkan tekanan dari pemangku kepentingan. Legitimasi pemangku kepentingan sangat penting bagi perusahaan. Sebab, ketika terdapat kesenjangan legitimasi, besar kemungkinan akan terjadi protes pemangku kepentingan terhadap perusahaan, sehingga berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan, stabilitas manajemen, dan profitabilitas.

Legitimasi dipandang sebagai sarana untuk menilai kualitas hidup suatu organisasi dan dicapai melalui operasional organisasi yang mematuhi peraturan dan diakui secara luas oleh masyarakat (O'Donovan, 2002).

Namun, perusahaan secara konsisten menggunakan layanan berbasis lingkungan dan mengungkapkan informasi lingkungan hidup hanya untuk mendapatkan persetujuan publik atas operasional perusahaan mereka (Ghozali dan Chariri, 2007), dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan tidak diakui.

Perusahaan mempunyai kontrak sosial dengan masyarakat di lingkungan bisnisnya, dan dengan menunjukkan hal tersebut, perusahaan diharapkan

memperoleh legitimasi di masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kelangsungan hidupnya.Pandangan ini juga didukung oleh

Reverte (2009), yang menyatakan bahwa teori legitimasi dengan jelas mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas sosial. Pengungkapan ini diharapkan dapat memberikan legitimasi perusahaan di masyarakat dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya.

Pendapat ini juga didukung oleh pendapat Guthrie dan Parker (1989) dalam Faisal et.al (2012: 21).. "Teori legitimasi didasarkan pada pemikiran bahwa legitimasi suatu badan usaha yang beroperasi dalam masyarakat bergantung pada kontrak sosial yang tersirat antara badan usaha tersebut dengan masyarakat.

Keberadaan suatu perusahaan tidak mengganggu atau bertepatan dengan keberadaannya. Oleh karena itu, ketika terjadi transisi menuju inkonsistensi, legitimasi perusahaan terancam (Deegan dkk., 2002).

Mengingat kuatnya ikatan sosial yang ada antara perusahaan dan masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diperkirakan akan berfungsi sebagai sarana komunikasi antar pemerintah, meningkatkan legitimasi bisnis, meningkatkan keuntungan bisnis dalam jangka panjang, dan memastikan kelangsungan bisnis.

2.2.3 Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengertian CSR (*Corporate Social Responsibility*), Konsep *Corporate Social Responsibility* sebenarnya bukanlah suatu hal yang asing pada saat ini dan telah menjadi sebuah komitmen tertentu bagi setiap perusahaan untuk

bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Menurut Soeharto (2007 : 16), CSR merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* dalam (Rahman, 2009 : 10) mendefenisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, komunitas setempat (lokal) dan masyarakat sebagai keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Dalam pengertian lain, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk perumusan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pandangan lebih komprehensif mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dikemukakan oleh Carrol dalam teori paradigma tanggung jawab sosial perusahaan. Menurutnya, tanggung jawab perusahaan dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomi, hukum, etis dan filantropis) yang merupakan satu

kesatuan. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomis, sebuah perusahaan haruslah menghasilkan laba sebagai pondasi untuk mempertahankan eksistensinya dan berkembang. Tanggung jawab ekonomis ini merupakan hasrat dan primitif dari perusahaan sebagai organisasi bisnis untuk

memenuhi keuntungan (laba).

Menurut Sen dan Bhattacharya yang dikutip oleh Muhajjir mengidentifikasi ada enam hal pokok yang termasuk dalam CSR, yaitu :

a. *Community support*, antara lain dukungan pada program-program pendidikan, kesehatan, kesenian dan sebagainya;
b. *Diversity*, merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan konsumen dan calon pekerja dalam hal gender (jenis kelamin), fisik (cacat) atau kedalam ras-ras tertentu;
c. *Employee support*, berupa perlindungan kepada tenaga kerja, insentif dan penghargaan serta jaminan keselamatan kerja;
d. *Environment*, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, mengelola limbah dengan baik, menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan dan sebagainya;
e. *Non-U.S operations*, perusahaan bertanggungjawab untuk memberikan hak yang sama bagi masyarakat dunia untuk mendapat kesempatan bekerja antara lain dengan membuka pabrik di luar negeri;
f. *Product*, perusahaan berkewajiban untuk membuat produk-produk yang aman bagi kesehatan, tidak menipu, melakukan riset, dan pengembangan produk secara berkelanjutan dan menggunakan kemasan yang bisa di daur ulang.

Pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 tentang kewajiban CSR bagi Perseroan Terbatas (PT) yaitu :

a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
b) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran;
c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun dalam menilai komitmen dan keseriusan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dapat dilihat berdasarkan :

1. Kepemimpinan (*Leadership*)

Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari *Top Management* perusahaan.

2. Proporsi Bantuan

CSR dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja, melainkan juga pada tingkatan serapan maksimal, artinya apakah arealnya luas, maka anggarannya harus lebih besar. Jadi, tidak dapat dijadikan tolak ukur, apabila anggaran yang besar pasti menghasilkan program yang bagus.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

a. Terdapat laporan tahunan;

b. Mempunyai mekanisme audit sosial dan finansial dimana audit sosial terkait dengan pengujian sejauh mana program-program CSR telah dapat ditujukan secara benar sesuai kebutuhan masyarakat, perusahaan mendapatkan umpan balik dari masyarakat secara benar dengan melakukan *interview* dengan para penerima manfaat.

4. Cakupan Wilayah (*Coverage Area*)

Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan.

5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

a. Dalam perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan *multistakeholder* pada setiap siklus pelaksanaan proyek;

b. Terdapat kesadaran untuk memperhatikan aspek-aspek lokalitas pada saat perencanaan ada kontribusi, pemahaman dan penerimaan terhadap budaya lokal yang ada;

c. Terdapat *blue print policy* yang menjadi dasar pelaksanaan program.

6. Pelibatan *Stakeholder* (*Stakeholder Engagement*)

Terdapat mekanisme koordinasi regular dengan *stakeholder*, utamanya masyarakat.

7. Keberlanjutan (*Sustainability*)

a. Terjadi alih peran dari korporat ke masyarakat;

b. Tumbuhnya rasa memiliki program dan hasil program pada diri masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan memelihara program dengan baik.

8. Hasil Nyata (*Outcome*)

a. Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya angka kesakitan dan kematian (dalam bidang kesehatan) atau berkurangnya angka buta huruf dan meningkatnya kemampuan SDM (dalam bidang pendidikan) atau parameter lainnya sesuai bidang CSR yang dipilih oleh perusahaan;

b. Terjadi perubahan pola pikir masyarakat;

c. Memberikan dampak ekonomi masyarakat yang dinamis.

Model CSR (*Corporate Social Responsibilty*)

Ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Keterlibatan langsung

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan kemasyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas *public relation*.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau

grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan- perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

3. Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa, Instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos), Media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Prinsip-Prinsip CSR (*Corporate Social Responsibilty*)

John Elkington (1997) yang dikutip oleh Hasibuan dan Sedyono (2006 : 73) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* dibagi menjadi tiga komponen prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines* (3P) yaitu sebagai berikut :

a. *Profit* (Keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha termasuk perusahaan. Tetapi, perusahaan tidak boleh hanya memiliki keuntungan bagi organisasinya saja tetapi harus dapat memberi kemajuan ekonomi bagi para *stakholder*nya dan apa tindakan yang sudah dilakukan perusahaan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di dalam masyarakat.

b. *People* (Manusia)

Perusahaan harus bertanggung jawab untuk memajukan dan mensejahterakan sosial serta seluruh *stakholder*nya. Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan. Perusahaan bisa membuat kegiatan untuk membangun masyarakat dan sumber daya manusia.

c. *Planet* (Lingkungan)

Perusahaan harus menjaga keadaan lingkungan khususnya di sekitar lingkungan perusahaan karena sudah kewajiban perusahaan untuk peduli

terhadap lingkungan. Perusahaan harus melakukan penerapan proses produksi yang bersih, aman dan bertanggung jawab.

Dengan konsep ini dapat memberikan pemahaman bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Manfaat Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibilty*), Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu :

a) Membangun dan menjaga reputasi perusahaan;
b) Meningkatkan citra perusahaan;
c) Melebarkan cakupan bisnis perusahaan;
d) Mempertahankan posisi merek perusahaan;
e) Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas;
f) Kemudahan memperoleh akses terhadap modal;
g) Memperoleh pengelolaan manajemen resiko.

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, bagi lingkungan dan pemangku kepentingan lainnya. Menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya :

a) Bagi perusahaan, terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan, perusahaan mendapatkan citra yang positif dari

masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadapt modal. Ketiga, perusahaan daapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko (*risk management*);

b) Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja;

c) Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.

Oleh karena itu, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk menunjukkan komitmen yang diberikan suatu perusahaan kepada kelompok dan individu di dalam perusahaan, serta membantu perusahaan mengkomunikasikan dampak yang ditimbulkan dari kegiatannya kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat luas dapat menyampaikan informasi.

Dijelaskan oleh Carroll (1999: 4-6), dalam CSR memuat komponen-komponen sebagai berikut :

1. Kewajiban finansial. Perusahaan mempunyai kewajiban dari segi finansial, yaitu. Keberadaan perusahaan didorong oleh tujuan mencapai kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab kepada para kreditur

sebagai satu kesatuan yang membantu perusahaan dalam pembiayaan sehingga perusahaan dapat melunasi pinjaman dan bunganya. Tanggung jawab keuangan sosial mengatur pelaksanaan tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. Hal ini karena tanggung jawab finansial merupakan prasyarat untuk memenuhi kewajiban lainnya, seperti kewajiban hukum, etika, dan kemitraan.

2. Kewajiban hukum. Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kegiatan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum.

3. Kewajiban Etis. Saat menjalankan aktivitasnya, perusahaan tidak hanya harus mematuhi peraturan yang berlaku, namun juga harus memiliki kewajiban untuk menyesuaikan aktivitasnya dengan standar sosial dan etika yang berlaku.

4. Tanggung Jawab Filantropis. Perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, namun juga kepada masyarakat dan lingkungan fisik di sekitar perusahaan. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan sosial ekonomi di wilayah tempat perusahaan beroperasi. Perusahaanlah yang memperoleh manfaat dari pemanfaatan sumber daya tersebut, sedangkan masyarakatlah yang menanggung akibat negatif dari penggunaan sumber daya tersebut.

sebagai tanggung jawab perusahaan atas hasil pengelolaan perusahaan, maka perusahaan harus mengembalikan sebagian keuntungan yang dihasilkannya kepada masyarakat dan memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, model kinerja CSR yang diungkapkan oleh Carroll (1991) dalam William (2012: 13) terdiri dari tiga aspek yang saling terintegrasi: definisi tanggung jawab sosial, yaitu permasalahan sosial yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Tentang daya tanggap permasalahan sosial yang menjadi tanggung jawab perusahaan meliputi perilaku konsumen, lingkungan hidup, diskriminasi pekerjaan, keamanan produk, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

Filosofi daya tanggap, di sisi lain, adalah filosofi, gaya, dan strategi di balik respons perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan masalah sosial yang muncul di masyarakat. Pengungkapan kinerja perusahaan sering kali bersifat sukarela (volunteer disclosure) oleh perusahaan (Murtanto, 2006).

Menurut Murtanto (2006), ada beberapa alasan mengapa perusahaan mengungkapkan manfaat sosial.Inilah alasannya: Tentukan tujuan sosial perusa haan Anda Meski sulit dideteksi dan diukur, analisis sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali.

Alasan kedua adalah diferensiasi produk. Ini adalah keterbukaan informasi yang digunakan perusahaan untuk membedakan dirinya dari pesaing yang tidak memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.

Yang ketiga adalah “kepentingan pribadi yang tercerahkan”, atau upaya perusahaan untuk menjaga keharmonisan sosial dengan para pemangku kepentingannya, karena hal tersebut diyakini dapat mempengaruhi penjualan dan harga saham perusahaan. (Multan, 2006 Perumana, 2012:) 24).

2.2.4 Sustainability Report

Laporan keberlanjutan merupakan aspek penting yang perlu diwaspadai oleh perusahaan (Fauzi, 2021). Laporan keberlanjutan adalah laporan yang memuat tentang kondisi kerja suatu perusahaan dalam kaitannya dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi dan disebarluaskan dalam satu tahun. Pelaporan keberlanjutan yang ditujukan kepada masyarakat dan investor sebagai wujud tanggung jawab perusahaan dibahas secara transparan (Madani & Gayatri, 2021). Salah satu tujuan utama pembuatan laporan keberlanjutan adalah untuk mengomunikasikan komitmen perusahaan dalam meluncurkan bisnis berkelanjutan (Wagiswari & Badera, 2021). Perusahaan dapat menjelaskan kegiatan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk laporan rinci pada setiap proyek (Yanti & Gayatri, 2021).

Pelaporan keberlanjutan, berdasarkan Pedoman Pelaporan Keberlanjutan, mengukur, mengungkapkan dan menunjukkan upaya perusahaan untuk menjadikan kinerjanya akuntabel kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk pembangunan berkelanjutan. Manfaat penerapan pelaporan keberlanjutan antara lain membantu perusahaan menambah nilai, meningkatkan citra positif, mengurangi risiko yang berdampak negatif pada perusahaan, meningkatkan kepercayaan pemegang saham, dan memberdayakan kelompok kepentingan lainnya dengan , termasuk memperkuat pertimbangan sosial dan lingkungan.

Beberapa perusahaan besar yang telah menerapkan pelaporan keberlanjutan menemukan bahwa meskipun pelaporan keberlanjutan untuk pemangku kepentingan internal mendorong partisipasi karyawan dalam pembangunan berkelanjutan, pelaporan keberlanjutan untuk pemangku kepentingan eksternal penting untuk kinerja organisasi komitmen organisasi sebagai akuntabilitas atas tindakan yang diambil, memungkinkan pemangku kepentingan mengukur upaya keberlanjutan organisasi dengan tingkat transparansi yang tinggi, untuk dapat berkomunikasi.

Manajemen Shell juga meyakini bahwa pelaporan keberlanjutan merupakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Dengan menerapkan pelaporan keberlanjutan, perusahaan diharapkan dapat menerapkan etika perusahaan untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan harus dilaporkan kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan suatu perusahaan mencakup berbagai pihak seperti pemegang saham, pemerintah, pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum. Pemegang saham ingin investasi lebih banyak, pemerintah ingin perusahaan mengikuti aturan yang ditetapkan, masyarakat umum ingin perusahaan menjaga lingkungan, dan perusahaan ingin proses produksinya ramah lingkungan. Sesuatu yang tidak merusak lingkungan. Sebagaimana disyaratkan oleh UU No. 40 tahun 2007 hal 66. Perusahaan harus mengungkapkan seluruh tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunannya.

2.2.5 Global Reporting Initiative (GRI) Standards

Standar GRI adalah pedoman yang digunakan secara global untuk melaporkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi kepada publik. Laporan keberlanjutan harus dibuat berdasarkan standar GRI dan memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (Setiani & Sinaga, 2021). Standar GRI mencakup tiga modul: Landasan GRI 101, Pengungkapan Umum GRI 102, dan Standar Umum, yang mencakup Pendekatan Manajemen GRI 103.

Untuk memulai seri standar GRI, GRI 101 tentang Pengungkapan merupakan menetapkan prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan konten dan kualitas laporan. Standar ini mencakup persyaratan untuk menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI dan memberikan informasi tentang cara menggunakan standar GRI. Selain itu, hal ini juga mencakup persyaratan khusus yang mengharuskan organisasi/perusahaan untuk menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar dan memberikan informasi pelaporan spesifik (Global Sustainability Standards Board, 2016).

GRI 102 (Pengungkapan Umum) adalah standar yang membahas elemen umum yang diperlukan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Standar ini mencakup persyaratan pelaporan terkait informasi kontekstual tentang organisasi dan praktik pelaporan keberlanjutannya. Organisasi dari semua ukuran, jenis, industri, dan lokasi geografis dapat menggunakan GRI 102 (Global Sustainability Standards Board, 2016).

GRI 103 (Pendekatan Manajemen) mengatur standar umum untuk pelaporan pendekatan manajemen terhadap topik material (Global Sustainability Standards Board, 2016). Selain itu, GRI 200 mencakup topik-topik spesifik terkait perekonomian, GRI 300 mencakup isu-isu sosial, dan GRI 400 mencakup tema-tema lingkungan hidup.

Saat ini juga terdapat modul standar tertentu seperti GRI-200 Economics, GRI-300 Environment, dan GRI-400 Society.Standar GRI mencakup ketentuan yang dapat dilaporkan dan tidak dapat dilaporkan atau referensi lain yang dapat digunakan untuk pelaporan (Gunawan & Meiden, 2021).

Gambar 2.1GRI-200 *Economy*

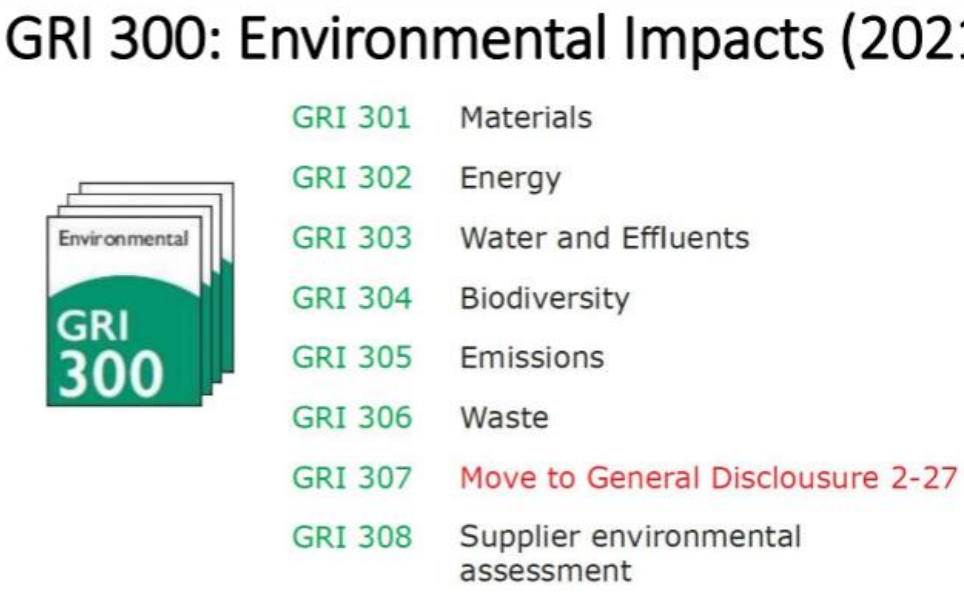

Gambar 2.2 GRI-300 *Environment*

GRI 300 adalah sebuah standar yang digunakan untuk pelaporan keberlanjutan oleh organisasi. Standar ini dirancang oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk membantu perusahaan dalam menyusun laporan yang transparan dan dapat dibandingkan secara internasional. GRI 300 mencakup aspek lingkungan seperti penggunaan energi, air, dan material, serta dampak emisi gas rumah kaca, limbah, dan keanekaragaman hayati. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan dari operasi bisnis, serta menyediakan informasi yang dapat membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih berkelanjutan.

Implementasi GRI 300 dalam pelaporan keberlanjutan memungkinkan organisasi untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan mengikuti panduan ini, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja lingkungan mereka secara lebih sistematis dan mendetail. Selain itu, laporan yang sesuai dengan GRI 300 juga dapat

meningkatkan kepercayaan dari investor, pelanggan, dan masyarakat umum karena mereka melihat adanya upaya nyata dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, organisasi dapat membangun reputasi yang lebih kuat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan global.

Berikut adalah pengukuran yang lebih rinci dari indikator-indikator GRI 300:

Material 301: Penggunaan Material

1.GRI 301-1: Material yang Digunakan Berdasarkan Berat atau Volume

a.Jenis material yang digunakan (misalnya, baja, plastik, kertas, dll.)

b.Berat atau volume total setiap jenis material yang digunakan dalam periode pelaporan

2.GRI 301-2: Material yang Digunakan Berasal dari Daur Ulang

a.Jenis material daur ulang yang digunakan

b.Persentase atau volume total material yang berasal dari daur ulang dibandingkan dengan total material yang digunakan

Energi 302: Konsumsi Energi

1.GRI 302-1: Konsumsi Energi dalam Organisasi

a.Total konsumsi energi dari sumber-sumber non-terbarukan (misalnya, listrik, gas alam, minyak, batu bara)

b.Total konsumsi energi dari sumber-sumber terbarukan (misalnya, energi matahari, angin, biomassa)

2.GRI 302-3: Intensitas Energi

a.Konsumsi energi total per unit produksi atau layanan (misalnya, kWh per ton produk atau kWh per unit layanan)

Air 303: Penggunaan Air

1.GRI 303-1: Pengambilan Air Berdasarkan Sumber

a.Total volume air yang diambil dari berbagai sumber (misalnya, air permukaan, air tanah, air hujan, air yang disuplai oleh pihak ketiga)

3.GRI 303-3: Daur Ulang dan Penggunaan Kembali Air

a.Volume air yang didaur ulang atau digunakan kembali sebagai persentase dari total konsumsi air

Keanekaragaman Hayati 304: Dampak Keanekaragaman Hayati

1.GRI 304-1: Lokasi Operasi dan Keanekaragaman Hayati

a.Daftar lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi

b.Deskripsi dampak dari operasi terhadap kawasan-kawasan tersebut

2.GRI 304-2: Dampak Signifikan pada Keanekaragaman Hayati

a.Penjelasan dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang terkena dampak

b.Upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut

Emisi 305: Emisi Gas Rumah Kaca

1.GRI 305-1: Emisi Gas Rumah Kaca Langsung (Scope 1)

a.Total emisi gas rumah kaca langsung dalam satuan ton CO2 ekuivalen

2.GRI 305-2: Emisi Gas Rumah Kaca Tidak Langsung dari Energi (Scope 2)

b.Total emisi gas rumah kaca tidak langsung dari konsumsi energi dalam satuan ton CO2 ekuivalen

3.GRI 305-3: Emisi Gas Rumah Kaca Tidak Langsung Lainnya (Scope 3)

a.Total emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya, termasuk emisi dari rantai pasokan dan transportasi, dalam satuan ton CO2 ekuivalen

Limbah 306: Pengelolaan Limbah

2.GRI 306-2: Jenis dan Metode Pembuangan Limbah

a.Total berat atau volume limbah yang dihasilkan, dibagi berdasarkan jenis limbah (misalnya, limbah berbahaya dan non-berbahaya)

b.Metode pembuangan limbah yang digunakan (misalnya, daur ulang,

pembakaran, penimbunan di tanah)

3.GRI 306-3: Jumlah Limbah Signifikan yang Dibuang

a.Volume atau berat limbah signifikan yang dibuang ke lingkungan (misalnya, air, udara, tanah)

Kepatuhan Lingkungan 307: Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Lingkungan

1.GRI 307-1: Jumlah Denda dan Sanksi

a.Jumlah total denda signifikan yang dikenakan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan

b.Jumlah total sanksi non-monetary yang diterima karena ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan

Gambar 2.3. GRI-400 *Social*

GRI 400 adalah bagian dari standar Global Reporting Initiative (GRI) yang berfokus pada aspek sosial dari keberlanjutan. Standar ini mencakup berbagai topik seperti hak asasi manusia, kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama GRI 400 adalah untuk membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan dampak sosial mereka secara transparan dan terstruktur. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan praktik sosial mereka, memastikan bahwa mereka bertindak secara etis dan bertanggung jawab, serta memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan.

Salah satu aspek penting dari GRI 400 adalah hak asasi manusia, yang mencakup indikator seperti kebijakan non-diskriminasi, kebebasan berserikat, dan penghapusan pekerja anak dan pekerja paksa. Organisasi diharapkan untuk melaporkan langkah-langkah yang mereka ambil untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati di seluruh operasi mereka dan rantai pasokan. Selain itu, GRI 400 juga mencakup kondisi kerja dan kesehatan serta keselamatan karyawan, dengan indikator yang mengukur tingkat kecelakaan kerja, pelatihan keselamatan, dan kepuasan karyawan. Dengan melaporkan indikator-indikator ini, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan karyawan dan lingkungan kerja yang aman.

Berikut adalah pengukuran yang lebih terperinci dari indikator-indikator dalam GRI 400, mulai dari GRI 401 hingga GRI 419:

GRI 401: Ketenagakerjaan

1.GRI 401-1: Perekrutan Karyawan Baru dan Turnover Karyawan

a.Jumlah dan persentase karyawan baru yang direkrut selama periode pelaporan, berdasarkan usia, gender, dan wilayah.

b.Tingkat turnover karyawan selama periode pelaporan, berdasarkan usia, gender, dan wilayah.

2.GRI 401-2: Tunjangan yang Diberikan kepada Karyawan Penuh Waktu yang Tidak Diberikan kepada Karyawan Sementara atau Paruh Waktu

a.Deskripsi tunjangan yang diberikan kepada karyawan penuh waktu (misalnya, asuransi kesehatan, cuti berbayar) dan perbedaan dengan yang diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu.

3.GRI 401-3: Cuti Melahirkan

a.Jumlah karyawan yang berhak dan mengambil cuti melahirkan.

b.Jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir.

c.Tingkat retensi karyawan setelah kembali bekerja dari cuti melahirkan.

GRI 402: Hubungan Karyawan-Manajemen

1.GRI 402-1: Pemberitahuan Minimum Mengenai Perubahan Operasional

a.Periode pemberitahuan minimum yang tercantum dalam perjanjian kolektif yang berkaitan dengan perubahan operasional yang signifikan.

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja

1. GRI 403-1: Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

a.Deskripsi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan dalam organisasi.

2.GRI 403-2: Jenis Cedera dan Tingkat Cedera, Penyakit, Hari Hilang, dan Jumlah Kematian Terkait Pekerjaan

a.Tingkat cedera kerja (misalnya, per 100 karyawan).

b.Tingkat penyakit akibat kerja.

c.Jumlah hari kerja yang hilang karena cedera atau penyakit.

d.Jumlah kematian terkait pekerjaan.

3.GRI 403-3: Kesehatan Pekerja yang Memiliki Risiko Tinggi atau Terkait dengan Pekerjaan

a.Deskripsi program kesehatan dan keselamatan yang ditujukan untuk pekerja dengan risiko tinggi.

4.GRI 403-4: Partisipasi, Konsultasi, dan Komunikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

a.Mekanisme partisipasi karyawan dalam manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan

1.GRI 404-1: Rata-rata Jam Pelatihan per Tahun per Karyawan

a.Rata-rata jam pelatihan yang diterima oleh setiap karyawan per tahun, berdasarkan kategori karyawan (misalnya, manajemen, staf).

2.GRI 404-2: Program untuk Peningkatan Keterampilan dan Dukungan Transisi

a.Deskripsi program pelatihan dan pengembangan yang ditawarkan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan mendukung transisi karier.

3.GRI 404-3: Persentase Karyawan yang Menerima Tinjauan Kinerja dan Pengembangan Karier

a.Persentase karyawan yang menerima tinjauan kinerja dan pengembangan karier secara reguler, berdasarkan gender dan kategori karyawan.

GRI 405: Keberagaman dan Kesempatan yang Setara

1.GRI 405-1: Keberagaman Badan Tata Kelola dan Karyawan

a.Komposisi badan tata kelola dan karyawan berdasarkan kategori seperti gender, usia, kelompok minoritas, dll.

2.GRI 405-2: Rasio Gaji Dasar dan Remunerasi Pria terhadap Wanita

a.Rasio gaji dasar dan remunerasi antara karyawan pria dan wanita dalam berbagai kategori pekerjaan.

GRI 406: Non-Diskriminasi

1.GRI 406-1: Insiden Diskriminasi dan Tindakan Perbaikan yang Dilakukan

a.Jumlah insiden diskriminasi yang dilaporkan.

b.Tindakan yang diambil untuk menangani dan menyelesaikan insiden-insiden tersebut.

GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif

1.GRI 407-1: Operasi dan Pemasok di Mana Hak untuk Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif Mungkin Terancam

a.Daftar operasi dan pemasok di mana hak-hak ini mungkin berisiko.

b.Langkah-langkah yang diambil untuk mendukung hak-hak ini.

GRI 408: Pekerja Anak

1.GRI 408-1: Operasi dan Pemasok dengan Risiko Signifikan Terlibat dalam Pekerja Anak

a.Operasi dan pemasok yang diidentifikasi memiliki risiko signifikan terlibat dalam pekerja anak.

b.Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dan menghilangkan risiko ini.

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib

1.GRI 409-1: Operasi dan Pemasok dengan Risiko Signifikan Terlibat dalam Kerja Paksa atau Wajib

a.Operasi dan pemasok yang diidentifikasi memiliki risiko signifikan terlibat dalam kerja paksa atau wajib.

b.Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dan menghilangkan risiko ini.

GRI 410: Keamanan Praktik

1.GRI 410-1: Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Petugas Keamanan

a.Jumlah dan persentase petugas keamanan yang telah menerima pelatihan hak asasi manusia.

GRI 411: Hak Masyarakat Adat

1.GRI 411-1: Insiden Pelanggaran Hak Masyarakat Adat

a.Jumlah insiden pelanggaran hak masyarakat adat yang teridentifikasi.

b.Tindakan yang diambil untuk menyelesaikan insiden-insiden tersebut.

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia

1.GRI 412-1: Operasi yang Ditinjau untuk Risiko Hak Asasi Manusia

a.Persentase operasi yang telah ditinjau untuk risiko hak asasi manusia.

2.GRI 412-2: Pelatihan Karyawan tentang Kebijakan dan Prosedur Hak Asasi Manusia

a.Jumlah jam pelatihan hak asasi manusia yang disediakan.

b.Persentase karyawan yang telah menerima pelatihan tersebut.

3.GRI 412-3: Perjanjian dan Kontrak Investasi yang Mencakup Klausul atau Penyaringan Hak Asasi Manusia

a.Persentase perjanjian investasi yang menyertakan klausul hak asasi manusia atau yang telah disaring untuk hak asasi manusia.

GRI 413: Komunitas Lokal

1.GRI 413-1: Operasi dengan Keterlibatan Masyarakat Lokal, Penilaian Dampak, dan Program Pengembangan

a.Persentase operasi yang telah melakukan keterlibatan masyarakat lokal dan penilaian dampak.

b.Deskripsi program pengembangan masyarakat yang dijalankan.

2.GRI 413-2: Operasi dengan Dampak Negatif Signifikan yang Nyata atau Potensial terhadap Komunitas Lokal

a.Jumlah operasi dengan dampak negatif signifikan yang nyata atau potensial terhadap komunitas lokal.

b.Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dampak-dampak ini.

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok

1.GRI 414-1: Persentase Pemasok Baru yang Disaring Menggunakan Kriteria Sosial

a.Persentase pemasok baru yang dievaluasi menggunakan kriteria sosial.

2.GRI 414-2: Dampak Sosial Negatif dalam Rantai Pasokan dan Tindakan yang Diambil

a.Jumlah dan jenis dampak sosial negatif yang diidentifikasi dalam rantai pasokan.

b.Tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan dampak tersebut.

GRI 415: Kebijakan Publik

1.GRI 415-1: Kontribusi Finansial untuk Politik

a.Jumlah kontribusi finansial yang diberikan untuk kegiatan politik atau kampanye.

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

1.GRI 416-1: Penilaian Dampak Kesehatan dan Keselamatan dari Kategori Produk dan Jasa

a.Persentase kategori produk dan jasa yang dievaluasi untuk dampak kesehatan dan keselamatan.

2.GRI 416-2: Insiden Ketidakpatuhan terkait Dampak Kesehatan dan Keselamatan dari Produk dan Jasa

a.Jumlah insiden ketidakpatuhan terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa.

b.Tindakan yang diambil untuk menyelesaikan insiden-insiden tersebut.

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan

1.GRI 417-1: Persyaratan untuk Informasi dan Pelabelan Produk dan Jasa

a.Deskripsi persyaratan informasi dan pelabelan produk dan jasa yang diikuti.

2.GRI 417-2: Insiden Ketidakpatuhan terkait Informasi Produk dan Pelabelan

GRI 418: Privasi Pelanggan

1.GRI 418-1: Keluhan yang Diterima Mengenai Pelanggaran Privasi dan Kehilangan Data Pelanggan

a.Jumlah keluhan yang diterima terkait pelanggaran privasi dan kehilangan data pelanggan.

b.Tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan-keluhan tersebut.

1.GRI 418-2: Pelanggaran Privasi yang Teridentifikasi

a.Jumlah dan jenis pelanggaran privasi yang teridentifikasi.

b.Langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki atau mengatasi pelanggaran tersebut.

GRI 419: Kepatuhan Sosial dan Ekonomi

1.GRI 419-1: Ketidakpatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Sosial dan Ekonomi

a.Jumlah denda signifikan yang dikenakan dan total nilai sanksi yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan sosial serta ekonomi.

2.GRI 419-2: Tindakan Hukum yang Diambil karena Pelanggaran Hukum

a.Jumlah tuntutan hukum yang diajukan terhadap perusahaan karena pelanggaran hukum sosial dan ekonomi.

b.Hasil dari tuntutan-tuntutan tersebut dan langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Dengan mengikuti pedoman GRI 400 dan mengimplementasikan pengukuran-pengukuran ini, organisasi dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi standar etika dan keberlanjutan yang diakui secara internasional, tetapi juga meningkatkan praktik sosial mereka secara berkelanjutan dan transparan. Ini membantu mereka membangun reputasi yang kuat, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan memperkuat hubungan mereka dengan pemangku kepentingan serta masyarakat secara Oleh karena itu, perusahaan perlu melaporkan aktivitas bisnisnya sesuai dengan pedoman Standar GRI agar CSR dan aktivitas keberlanjutan lainnya dapat dilihat oleh publik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Kegiatan CSR dapat dibagi menjadi dua jenis: CSR internal dan CSR eksternal. Kegiatan CSR eksternal meliputi dukungan lingkungan, dukungan produk, dan dukungan komunitas. Kegiatan CSR internal kami terdiri dari dua bagian: pengembangan karyawan dan keberagaman. Perlindungan pekerja, insentif dan jaminan keselamatan kerja merupakan bagian dari pengembangan pekerja. Pengungkapan CSR harus dimasukkan dalam laporan keberlanjutan.

Praktik pengungkapan CSR dalam laporan keberlanjutan masih rendah di Indonesia, dan meskipun perusahaan lebih memilih menggunakan laporan tahunan dalam praktik pengungkapan CSR mereka, namun pengungkapan kategori sosial, khususnya sumber daya manusia, masih minim; sumber daya

manusia. Pengungkapan CSR baik dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan mengacu pada Pedoman Pelaporan Keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI). Pengungkapan CSR diukur dan dievaluasi menggunakan indikator GRI. Menganalisis pengungkapan aktivitas CSR suatu perusahaan dengan menggunakan indikator GRI akan mengungkapkan kelengkapan isi laporan, kepatuhan terhadap pedoman dan standar yang berlaku, dan apakah laporan tersebut berkelanjutan atau tidak. Diagram alur kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut.

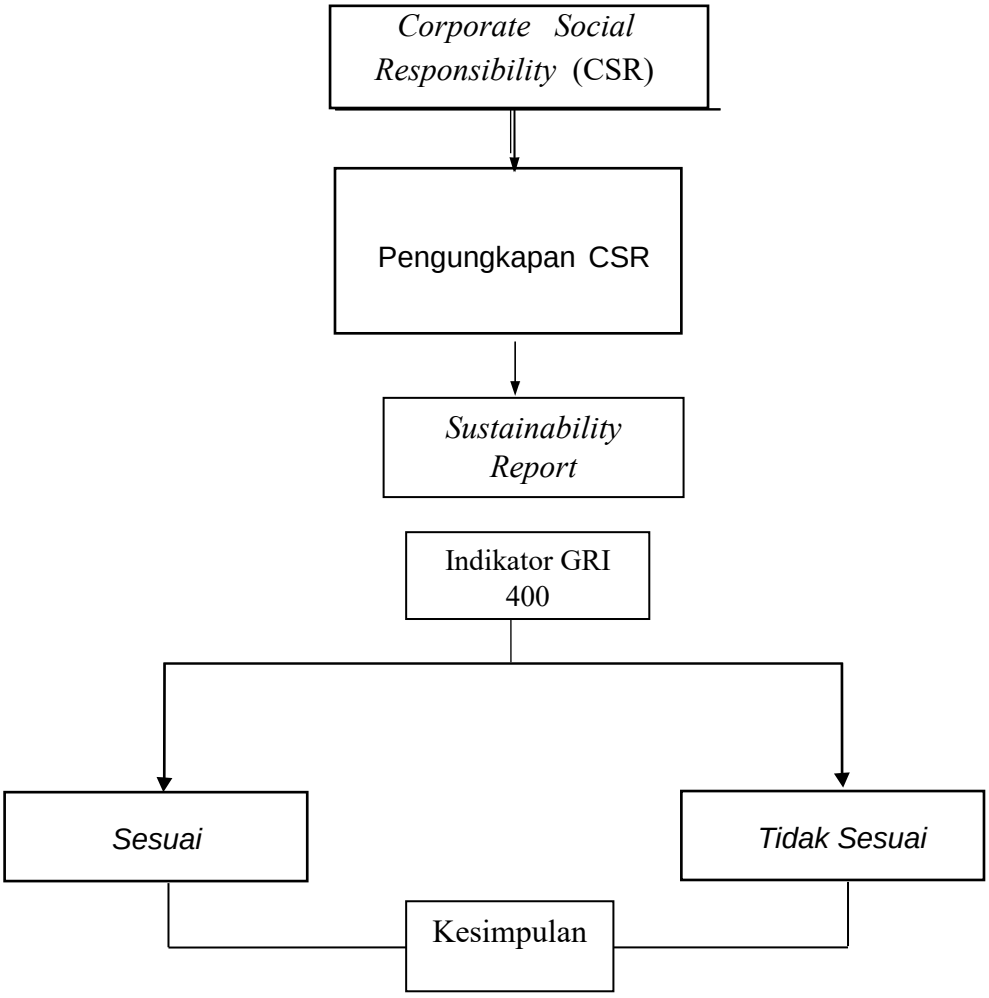

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka diatas, Analisis Program CSR Dalam *Sustainability Report* Berdasarkan GRI 400 *Standards* Pada Perusahaan PT Sat Nusapersada Tbk. Maka CSR pada perusahaan manufakture PT Sat Nusapersada Tbk. Melibat bagaimana kinerja dan pengungkapannya. Kemudian di proses dan di bentuk menjadi sustainability report dengan menggunakan indikator GRI yang sudah sesuai atau belum.